

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Integritas laporan keuangan merupakan fondasi utama dalam sistem pelaporan keuangan perusahaan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara manajemen dan para pemangku kepentingan (Dashkevich et al., 2024; Galingging & Yulianto, 2024; Salehi et al., 2023). Laporan keuangan yang berintegritas mencerminkan informasi yang relevan, andal, jujur, serta disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum tanpa adanya unsur manipulasi atau rekayasa (Nurbaiti et al., 2021).

Informasi keuangan yang disusun secara berintegritas juga berperan sebagai sinyal yang valid bagi investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membentuk persepsi terhadap nilai dan kredibilitas perusahaan (Alharasis, 2025; Ismail et al., 2024; Landu et al., 2025). Dalam konteks pasar modal, tingkat kepercayaan investor dan kreditur sangat dipengaruhi oleh kualitas serta integritas informasi keuangan yang dipublikasikan (Roszkowska, 2021). Laporan keuangan yang dapat dipercaya memungkinkan investor menilai tingkat risiko dan potensi pengembalian secara lebih rasional, sehingga keputusan ekonomi yang diambil tidak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan perusahaan (Fadika & Indra, 2024). Sebaliknya, ketika laporan keuangan disusun tanpa integritas, nilai informatifnya menurun dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam

pengukuran risiko maupun alokasi modal akibat adanya asimetri informasi antara manajemen dan pemilik modal (Indarti et al., 2023). Oleh karena itu, integritas laporan keuangan menjadi prasyarat penting bagi terbentuknya persepsi pasar yang wajar dan efisien, sekaligus mendukung terciptanya sistem pasar modal yang sehat dan berkelanjutan (Achmad et al., 2022; Khamainy et al., 2022; Yousefi Nejad et al., 2024).

Dalam upaya menjaga integritas laporan keuangan, perusahaan perlu menerapkan prinsip konservatisme akuntansi sebagai bentuk kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian bisnis (Abiyu, 2025). Prinsip ini mendorong pengakuan beban lebih cepat dibandingkan pendapatan, sehingga dapat menekan optimisme berlebihan dalam pelaporan keuangan (D. Abbas et al., 2022). Penerapan prinsip ini dinilai mampu membatasi perilaku oportunistik manajemen dalam melakukan manipulasi laporan keuangan. Dengan demikian, konservatisme akuntansi dapat meningkatkan kualitas dan integritas laporan keuangan serta membantu investor memperoleh informasi yang lebih andal dalam menilai kondisi perusahaan (Zou & Othman, 2024).

Meskipun demikian, integritas laporan keuangan masih menjadi isu penting dalam praktik bisnis di Indonesia. Salah satu kasus yang banyak mendapat perhatian terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. terkait laporan keuangan tahun buku 2018. Perusahaan mengakui pendapatan sekitar USD239 juta yang berasal dari kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi, meskipun transaksi tersebut belum memenuhi persyaratan pengakuan pendapatan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Pengakuan tersebut menyebabkan laporan keuangan tahun 2018 menunjukkan laba bersih, padahal tanpa pencatatan tersebut perusahaan seharusnya masih membukukan kerugian. Keputusan tersebut juga menimbulkan perbedaan pendapat di tingkat dewan komisaris, yang ditandai dengan penolakan dua komisaris untuk menandatangani laporan keuangan karena menilai perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Hasil pemeriksaan regulator kemudian mewajibkan perusahaan melakukan penyajian kembali (*restatement*) atas laporan keuangan, sehingga laba yang sebelumnya dilaporkan dikoreksi menjadi rugi bersih (Kompasiana.com, 2025).

Kasus tersebut merefleksikan terjadinya pengakuan pendapatan secara prematur (*premature revenue recognition*) yang menyebabkan kinerja keuangan dan posisi finansial perusahaan terpresentasikan secara berlebihan (*overstated*), sehingga tidak merepresentasikan substansi ekonomi transaksi secara memadai. Kondisi tersebut merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip konservatisme dalam akuntansi yang berimplikasi pada terdegradasinya keandalan dan integritas laporan keuangan, serta meningkatkan risiko terjadinya distorsi informasi yang dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan oleh investor, kreditor, maupun pemangku kepentingan lainnya (Abiyu, 2025). Sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut, pada tahun 2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. serta mewajibkan perusahaan melakukan penyajian kembali (*restatement*) atas laporan keuangan yang telah dipublikasikan.

Kasus tersebut mengindikasikan bahwa rendahnya integritas laporan keuangan tidak semata-mata dipicu oleh ketidaktepatan dalam penerapan kebijakan akuntansi, melainkan juga merefleksikan belum optimalnya implementasi tata kelola perusahaan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Meskipun terdapat perbedaan pandangan dari sebagian anggota dewan komisaris, mekanisme pengawasan yang diterapkan belum mampu mengantisipasi penerbitan laporan keuangan yang tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan standar akuntansi. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa fungsi monitoring, proses evaluasi, dan sistem pengendalian internal belum terlaksana secara efektif dalam menjamin kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta menjaga kualitas pelaporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang ditopang oleh sistem pengendalian internal yang efektif merupakan prasyarat esensial untuk mewujudkan laporan keuangan yang transparan, andal, dan merepresentasikan kondisi ekonomi perusahaan secara wajar. Sinergi antara kedua mekanisme tersebut diharapkan mampu memperkuat integritas laporan keuangan sekaligus mempertahankan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan yang disajikan.

Fenomena serupa turut ditemukan pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45, yaitu kelompok emiten yang dicirikan oleh kapitalisasi pasar yang besar serta tingkat likuiditas saham yang tinggi, sehingga dijadikan sebagai salah satu indikator utama oleh investor dalam melakukan penilaian di Bursa Efek Indonesia (Gunawan, 2022). Dengan karakteristik tersebut, penyajian

laporan keuangan yang transparan, andal, dan berintegritas semestinya dapat diwujudkan. Akan tetapi, besarnya kapitalisasi pasar dan tingginya likuiditas saham belum tentu diikuti oleh kualitas informasi keuangan yang memadai. Sebaliknya, tekanan untuk mempertahankan kinerja perusahaan dan ekspektasi pasar dapat dihadapi oleh manajemen dengan praktik pelaporan keuangan yang berpotensi menurunkan integritas laporan keuangan (Munandar & Honggowati, 2025; Sandany et al., 2024).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diindikasikan adanya praktik rekayasa laporan keuangan pada tahun 2021. Pada periode tersebut, laba bersih sekitar Rp33,5 miliar masih dilaporkan, meskipun arus kas operasional mengalami defisit sebesar Rp3,7 triliun (Tempo, 2023). Ketidaksesuaian antara laba yang disajikan dan kondisi arus kas tersebut mengindikasikan bahwa substansi ekonomi perusahaan belum sepenuhnya direpresentasikan secara wajar dalam laporan keuangan (Nurannisa et al., 2025). Dalam perspektif teori agensi, kondisi tersebut dipandang sebagai manifestasi dari asimetri informasi yang memungkinkan penyajian informasi secara oportunistik oleh manajemen (Matinheikki et al., 2022). Sebagai implikasinya, penurunan kepercayaan pasar dialami oleh perusahaan, sehingga statusnya sebagai konstituen indeks LQ45 tidak lagi dipertahankan pada tahun 2023.

Melalui kasus PT Waskita Karya, dapat dipahami bahwa kerentanan terhadap penurunan integritas laporan keuangan tetap dapat dialami oleh perusahaan yang memiliki skala usaha besar dan reputasi korporasi yang kuat

apabila implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) belum terlaksana secara efektif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa belum optimalnya penginternalisasian prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*) berpotensi menyebabkan terdegradasinya keandalan laporan keuangan, terkikisnya kepercayaan investor, serta terancamnya keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian, *Good Corporate Governance* (GCG) tidak semata-mata diposisikan sebagai instrumen kepatuhan terhadap regulasi, melainkan juga difungsikan sebagai mekanisme tata kelola yang esensial untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara objektif, andal, serta merepresentasikan substansi ekonomi perusahaan secara wajar.

Integritas laporan keuangan tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi, melainkan juga dipengaruhi secara signifikan oleh efektivitas tata kelola perusahaan serta karakteristik yang melekat pada perusahaan itu sendiri (Obasan & Kuola, 2025). Dalam konteks tersebut, keberadaan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial dipandang sebagai determinan yang berpotensi memperkuat integritas laporan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara faktor-faktor tersebut dengan integritas laporan keuangan perlu dikembangkan agar mekanisme yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan dapat dijelaskan secara lebih mendalam (Gunawan, 2022).

Salah satu instrumen *Good Corporate Governance* (GCG) yang diyakini memiliki signifikansi dalam menopang integritas laporan keuangan adalah eksistensi komisaris independen. Dalam struktur tata kelola perusahaan, komisaris independen diamanatkan untuk mengemban fungsi pengawasan secara imparial serta terbebas dari afiliasi kepentingan dengan pihak manajemen (D. S. Abbas et al., 2021). Melalui pelaksanaan mandat tersebut, potensi konflik keagenan di antara manajemen dan pemegang saham diharapkan dapat diredam, sementara peluang terjadinya distorsi maupun manipulasi dalam proses penyusunan laporan keuangan dapat diminimalisasi (Damayanti et al., 2023). Bukti empiris yang dilaporkan oleh Azizah et al. (2023), Azzah (2021), Lestari dan Shanti (2024), serta Rifa'i dan Stiawan (2025) mengafirmasi bahwa komisaris independen memberikan kontribusi yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa peningkatan proporsi komisaris independen berkorelasi dengan semakin kokohnya mekanisme monitoring terhadap tindakan manajemen, sehingga kredibilitas dan integritas pelaporan keuangan dapat semakin terpelihara. Di sisi lain, simpulan yang kontradiktif diungkapkan oleh Damayanti et al. (2023), Fatin dan Suzan (2022), Nurbaiti et al. (2021), serta Purnamasari dan Syahputra (2025), yang mengemukakan bahwa eksistensi komisaris independen belum mampu menghadirkan implikasi yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Di samping komisaris independen, ukuran perusahaan turut dipandang sebagai determinan yang berpotensi memengaruhi integritas laporan keuangan.

Ukuran perusahaan direfleksikan melalui besaran aset yang dikuasai serta kompleksitas aktivitas operasional yang dijalankan perusahaan (Piscesta & Gunawan, 2022). Pada umumnya, perusahaan berskala besar ditunjang oleh sistem pengendalian internal yang lebih mapan serta berada dalam intensitas pengawasan yang lebih ketat dari regulator maupun publik. Dengan karakteristik tersebut, penyusunan laporan keuangan yang memiliki tingkat integritas tinggi diharapkan lebih mudah diwujudkan (Widjayanti et al., 2025). Meskipun demikian, besarnya skala perusahaan juga diiringi oleh ekspektasi pasar yang semakin tinggi untuk mempertahankan stabilitas kinerja dan reputasi korporasi, sehingga ruang terjadinya praktik manajemen laba berpotensi semakin terbuka. Bukti empiris yang dipublikasikan oleh Aprilita dan Karlina (2024), Damayanti et al. (2023), Rivandi dan Pramudia (2022), serta Nurbaiti et al. (2021) mengonfirmasi bahwa ukuran perusahaan memberikan implikasi terhadap integritas laporan keuangan. Sebaliknya, hasil yang bersifat antitetis dilaporkan oleh Dewi et al. (2025), Purnamasari dan Syahputra (2025), Santoso dan Andarsari (2022), serta Syafana dan Parinduri (2024), yang mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan belum mampu menjelaskan variasi integritas laporan keuangan secara signifikan.

Selain mekanisme pengawasan, struktur kepemilikan perusahaan juga dipandang sebagai determinan yang dapat memengaruhi kualitas integritas laporan keuangan, salah satunya melalui kepemilikan manajerial. Konsep kepemilikan manajerial merujuk pada tingkat partisipasi manajemen dalam struktur kepemilikan saham perusahaan, sehingga posisi manajemen tidak

hanya bertindak sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pemilik modal yang memiliki kepentingan ekonomi secara langsung (D. Abbas et al., 2022). Kondisi tersebut diyakini mampu mereduksi konflik keagenan karena konsekuensi ekonomi atas setiap keputusan yang diambil turut ditanggung oleh pihak manajemen. Dengan demikian, semakin besar porsi saham yang dimiliki manajemen, semakin kuat dorongan untuk menjaga kredibilitas pelaporan keuangan melalui penyajian informasi yang objektif, andal, dan terbebas dari praktik manipulatif (Altania & Tanno, 2023). Sejumlah temuan empiris telah mengemukakan bukti yang beragam mengenai hubungan antara kepemilikan manajerial dan integritas laporan keuangan. Setiadi dan Dewi (2023), Syafana dan Parinduri (2024), Tamara dan Kartika (2021), serta Damayanti et al. (2023) mengafirmasi bahwa kepemilikan manajerial memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan integritas laporan keuangan. Sebaliknya, hasil yang tidak sejalan dilaporkan oleh Aprilita dan Karlina (2024), Fatin dan Suzan (2022), Nurbaiti et al. (2021), Rifa'i dan Stiawan (2025), serta Santoso dan Andarsari (2022), yang menyimpulkan bahwa proporsi kepemilikan saham oleh manajemen belum terbukti memberikan implikasi yang signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil beragam dan adanya inkonsistensi dalam temuan serta masih terbatasnya studi terkait variabel yang diteliti, maka dari itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Komisaris Independen, Ukuran**

Perusahaan, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Integritas Laporan Keuangan”.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti mendapati adanya celah dalam literatur yang menunjukkan kontradiksi hasil serta kurangnya penelitian yang mendalam terkait pengaruh variabel komisaris independen, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan?
3. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian tersebut, maka didapati tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan;
2. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan;
3. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan kajian teori agensi dengan menyediakan bukti empiris mengenai keterkaitan antara komisaris independen, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial dengan integritas laporan keuangan pada perusahaan yang tercatat dalam indeks LQ45. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas khazanah literatur mengenai efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan serta karakteristik korporasi dalam mereduksi potensi konflik keagenan yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mempertegas relevansi mekanisme tata kelola perusahaan dalam mewujudkan pelaporan keuangan yang berintegritas sehingga informasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang memadai untuk mendukung proses pengambilan keputusan ekonomi oleh investor.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam memperkuat integritas laporan keuangan melalui optimalisasi fungsi komisaris independen, penyesuaian praktik pengelolaan perusahaan dengan skala dan kompleksitas operasional, serta penguatan kepemilikan manajerial yang mencerminkan

transparansi, partisipasi aktif, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan strategis.

- b. Bagi Investor, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi yang digunakan dalam mengevaluasi tingkat integritas laporan keuangan perusahaan, sehingga mampu mendukung penyusunan keputusan investasi yang lebih rasional, objektif, dan berbasis pada kualitas informasi keuangan.
- c. Bagi Regulator, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bukti empiris yang dapat dijadikan landasan dalam penyusunan, penyempurnaan, maupun evaluasi kebijakan mengenai tata kelola perusahaan, sehingga efektivitas pengawasan dan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan publik dapat terus ditingkatkan.

